



PENGAWASAN PEKERJAAN STANDARDISASI OUTLET KANTOR PELAYANAN KEUANGAN PUBLIK. DI TAMANSARI, PONOROGO

Azhar Dhika Winarto¹, Yudha Rachman Winarto²

^{1,2}Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional Malang, Malang Indonesia

* Penulis Korespodensi : azhar.dhika18@gmail.com

Received :
20-08-2024

Revised :
03-09-2024

Accepted :
24-09-2024

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan standardisasi outlet kantor pelayanan keuangan publik di Tamansari, Ponorogo. Standarisasi outlet ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh instansi keuangan publik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Proyek ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan, pengawasan langsung terhadap pekerjaan pembangunan outlet, serta evaluasi terhadap implementasi standar yang sudah ditentukan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap outlet memiliki fasilitas yang memadai untuk melayani masyarakat dengan baik.

Kata kunci: pengawasan, pekerjaan standardisasi, outlet, kantor pelayanan keuangan, publik.

,

Abstract

This community service aims to supervise the standardization work of public financial service office outlets in Tamansari, Ponorogo. Standardization of these outlets is very important to ensure that the services provided by public financial institutions can run in accordance with applicable provisions and standards. This project is carried out by providing training, direct supervision of outlet construction work, and evaluation of the implementation of predetermined standards. The results of this activity are expected to improve the quality of public services and ensure that each outlet has adequate facilities to serve the public well.

Keywords: supervision, standardization work, outlets, financial service offices, public.



I. PENDAHULUAN

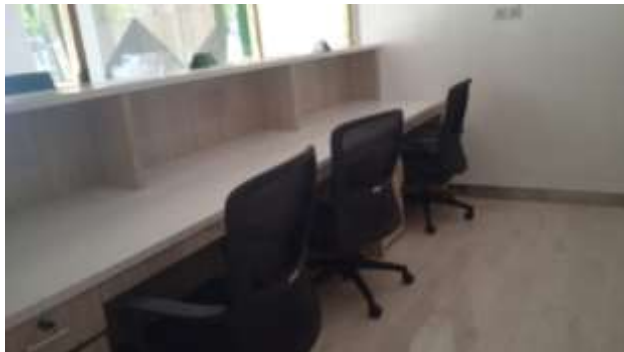
Pelayanan publik yang efektif memerlukan sistem yang terstandarisasi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efisien. Menurut Grindle (1980), pelayanan publik yang efektif memerlukan sistem yang terstandarisasi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efisien. Proses standarisasi ini juga didukung oleh pendapat Osborne dan Gaebler (1992), yang menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik untuk memastikan bahwa pemerintah mampu memberikan layanan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap pekerjaan standardisasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap outlet memiliki fasilitas yang memadai, sesuai standar yang ditetapkan, dan dapat berfungsi dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya standar pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Selain itu, penelitian oleh Asmarianti dan Ikram (2023) menunjukkan bahwa pemberian layanan publik saat ini merupakan kebutuhan yang sangat krusial bagi masyarakat, di mana kebutuhan ini sudah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrasi. Dengan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mengawasi proses standardisasi outlet kantor pelayanan keuangan publik di Tamansari, Ponorogo, sekaligus memberikan pelatihan dan evaluasi guna memastikan tercapainya kualitas layanan yang optimal. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan konstruksi, harus dirumuskan mulai dari tujuan, sasaran, keterlibatan pihak yang berkompetensi, pelaksanaan fisik bangunan maupun faktor biaya konstruksi, struktur konstruksi bangunan pada pembangunan. Administrasi proyek maupun segala sesuatu yang secara profesional, tepat guna, tepat sasaran dan benar.

Pengabdian masyarakat di bidang teknik sipil dalam pengawasan pekerjaan standardisasi outlet kantor pelayanan keuangan publik, memiliki peran yang sangat penting. Pengawasan pekerjaan memastikan bahwa proses pembangunan dan renovasi outlet dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam konteks kantor pelayanan keuangan publik, infrastruktur yang berkualitas akan mendukung operasional yang efisien dan nyaman bagi masyarakat pengguna layanan dengan memastikan kekokohan struktur bangunan, tata letak yang optimal, dan penggunaan material yang sesuai spesifikasi. Outlet kantor pelayanan keuangan publik adalah sarana utama yang digunakan oleh masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Dengan standar yang baik, kantor ini dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan memadai. Pengawasan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat memastikan bahwa pembangunan fasilitas ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan standar pelayanan publik. Pengabdian masyarakat ini memberikan kesempatan bagi tenaga ahli di bidang teknik sipil untuk berkontribusi langsung dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Melalui pengawasan proyek, para profesional teknik sipil dapat memastikan bahwa desain, konstruksi, dan pengelolaan fasilitas publik mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keamanan. Standarisasi infrastruktur pelayanan publik sering kali telah diatur dalam regulasi pemerintah, seperti peraturan teknis tentang konstruksi dan standar pelayanan publik. Pengawasan yang dilakukan membantu memastikan bahwa pembangunan outlet sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko ketidaksesuaian yang dapat berdampak negatif pada masyarakat maupun instansi terkait. Melalui pengawasan kegiatan ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran pembangunan. Kesalahan dalam desain atau pelaksanaan konstruksi dapat menimbulkan pembengkakan biaya. Dengan melakukan pengawasan secara

langsung, pengabdian masyarakat membantu mencegah terjadinya inefisiensi tersebut. Kegiatan ini dapat menjadi model atau proyek percontohan bagi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur serupa di wilayah lain. Hasil dari pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan di lokasi lain, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Tamansari, Ponorogo, tetapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Kegiatan ini juga memiliki dimensi edukasi, baik bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Melalui pelatihan dan pengawasan, kesadaran akan pentingnya infrastruktur publik yang berkualitas semakin meningkat, sehingga mendorong semua pihak untuk lebih peduli terhadap standar teknis dan manfaat jangka panjangnya.

Pengabdian masyarakat di bidang teknik sipil dalam pengawasan pekerjaan standardisasi outlet kantor pelayanan keuangan publik, adalah upaya nyata untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat pengguna layanan, tetapi juga mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era modern.



Gambar 1. Ruang Pelayanan Publik

Sumber: Dokumen Pengabdian



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Sumber: Dokumen Pengabdian

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Pelatihan Standarisasi

Memberikan pelatihan tentang standar desain dan operasional outlet kantor pelayanan keuangan publik kepada staf dan pekerja yang terlibat dalam proyek.

2. Pengawasan Pekerjaan

Melakukan pengawasan langsung terhadap proses pembangunan dan renovasi outlet untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

3. Evaluasi dan Rekomendasi

Melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan teknis yaitu pekerjaan – pekerjaan :

1. Menyetujui dan memberikan arahan – arahan untuk peralatan – peralatan dan metoda kerja pelaksana konstruksi.
2. Memeriksa bahan – bahan / barang – barang yang akan dipakai dalam proyek, baik kuantitas maupun kualitas
3. Memeriksa dan menyetujui ketepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai gambar – gambar dan spesifikasi teknis.
4. Memeriksa dan menyetujui sarana - sarana untuk menunjang pelaksanaan
5. Mengawasi dan menyetujui hasil uji coba pekerjaan oleh pelaksana dan apabila perlu mengadakan re – desain.

Setelah dilakukan pengawasan dan evaluasi, diperoleh beberapa temuan penting, antara lain:

- Proses pembangunan outlet sudah hampir sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, namun terdapat beberapa aspek minor yang perlu disesuaikan, terutama dalam hal tata letak ruang dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- Pelatihan yang diberikan kepada pihak terkait telah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya standarisasi dalam

pelayanan publik dan memberikan dampak positif terhadap proses pembangunan.



Gambar 3. Pengawasan Kegiatan pemasangan plafond

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tamansari, Ponorogo. Pengawasan terhadap pekerjaan standarisasi outlet kantor pelayanan keuangan publik telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa perbaikan kecil yang perlu dilakukan. Diharapkan dengan adanya pengawasan dan pelatihan ini, kualitas layanan yang diberikan oleh kantor pelayanan keuangan publik dapat meningkat, dan outlet yang ada dapat memenuhi standar yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat dengan lebih optimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada kepada Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional Malang dan disampaikan kepada pihak- pihak yang membantu pelaksanaan pengabdian masyarakat

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Asmarianti, N., & Ikram, M. (2023). Analisis kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jap.v10i3.12345>
2. Departemen Perencanaan dan Pembangunan. (2018). *Standar Infrastruktur untuk Kantor Pelayanan Publik*.



-
3. Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
 4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman standar pembangunan dan pengelolaan kantor pelayanan keuangan publik*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
 5. Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
 6. Suparman, T., & Rachmat, A. (2023). Evaluasi kinerja konsultan pengawas dalam proyek pembangunan gedung pemerintah. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 11(2), 45–60. <https://doi.org/10.5678/jtsa.v11i2.5678>